BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Melalui penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Tingkat kemampuan aparatur KPK sudah cukup baik dalam melakukan pekerjaannya untuk meminimalisir tindakan korupsi di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat dari berhasilnya KPK mengembalikan uang negara. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan bagi setiap aparatur menjadi bukti bahwa aparatur KPK perlu menambah wawasan dan pengetahuannya dalam bidang tindakan korupsi.
2. Motivasi aparatur KPK sudah cukup baik dalam pelaksanaan tugasnya karena terpenuhinya kebutuhan primer, umum, serta kebutuhan sekunder aparatur. Kasus korupsi yang begitu banyak satu persatu berhasil dibawa ke jalur hukum. Sebagian diantara pelaku korupsi sudah di bawa ke pengadilan bahkan divonis bersalah sedangkan yang lain masih dalam proses penyelesaian. Tindakan korupsi yang merugikan masyarakat juga negara menjadi motivasi dan dorongan yang kuat bagi aparatur untuk tetap giat dalam melakukan tanggungjawabnya**.** Pemberian insentif bagi aparatur KPK juga menjadi penyemangat aparatur dalam bekerja untuk tetap berprestasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan, berikut adalah saran dari peneliti untuk peningkatan kualitas kerja aparatur KPK. Saran ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur KPK untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Aparatur KPK harus lebih meningkatkan tingkat kemampuannya agar mampu menuntaskan tindakan korupsi. Melalui pendidikan dan pelatihan aparatur KPK akan mampu menindak kasus korupsi ke jalan hukum. Aparatur KPK harus mengeluarkan segenap potensinya untuk mampu berprestasi dalam pekerjaannya. Dengan study banding, training, dan pendidikan ke luar negeri diharapkan tidak menjadi hal yang sia-sia dilakukan. Kerjasama dengan pihak KPK diluar negeri harus lebih ditingkatkan lagi untuk saling berbagi dalam hal meningkatkan kualitas kerja aparatur KPK.
2. Aparatur KPK harus lebih lagi memiliki motivasi yang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Pemberantasan korupsi yang merugikan masyarakat juga pemerintah harusnya menjadi pendorong yang kuat bagi aparatur KPK untuk lebih giat lagi menindaklanjuti setiap tindakan korupsi. Melalui pemenuhan kebutuhan primer, kebutuhan umum dan kebutuhan sekunder aparatur KPK seharusnya mampu menunjukkan prestasinya dalam menyelesaikan tindakan korupsi di Provinsi DKI Jakarta.

3. Aparatur KPK diharapkan tidak memilih-milih penyelesaian kasus korupsi. Aparatur KPK harus memihak pada kebenaran tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Aparatur KPK harus lebih banyak lagi memberikan pendidikan antikorupsi kepada setiap kalangan masyarakat di seluruh Indonesia secara merata, agar masyarakat juga memahami betapa pentingnya mengetahui bahaya melakukan korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat diberikan melalui media televise, radio, jejaring sosial, koran, majalah dan media lainnya.